



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Januari 2025

**Jl. P Mandurorejo No. 84 A Kajen 51161
Telp. (0285) 382 002 Fax (0285) 382 001**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaanya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kajen, 30 Januari 2026

Sekretaris



Bambang Yusmanto, SE, M.Si

NIP. 19691202 199703 1 00

KOMISI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SEMILIHAN

LIHAN

UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jl. Mandurorejo No. 84 A – KAJEN 51161

Telp. (0285) 382002 Fax. (0285) 382001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kajen, 30 Januari 2026

Sekretaris



BAMBANG YUSMANTO, SE, M.Si
NIP. 19691202 199703 1 003

KOMISI



**RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN**

EMER

LIHAN

UMU

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode I Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 426.833.700 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.595.044.058 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.687.661.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 609.795.235 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 0 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 609.795.235 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 82.812.769 dan Rp 526.982.466

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 5.101.658.363 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 5.101.658.363 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 4.420.007.250

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Semester II tahun 2025 pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 6.675.969.119 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 4.420.007.250 kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.046.023.358 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 3.046.023.358.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KOMISI

**LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**

PEMILIHAN

LIHAN

UMUM





NERACA

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		-	214.570.125
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	5.897.189.761
Persediaan	C.3	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	6.111.759.886
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	2.649.514.962	2.370.702.550
Gedung dan Bangunan	C.5	97.718.000	97.718.000
Peralatan dan Mesin Belum Register	C.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(2.140.637.727)	(1.907.087.467)
Aset Tetap lainnya	C.8	3.200.000	3.200.000
Jumlah Aset Tetap		609.795.235	564.533.083
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	202.231.500	202.231.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(202.231.500)	(202.231.500)
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET		609.795.235	6.676.292.969
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	82.812.769	323.850
Uang Muka dari KPPN	C.12	-	
Utang yang Belum Ditagihkan		-	
Utang Jangka Pendek Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		82.812.769	323.850



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2025 DAN 30 2024**

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.1	3.201.542.467	2.658.332.626
Beban Persediaan	D.2	-	5.884.823.702
Beban Barang dan Jasa	D.3	1.026.305.736	81.680.967.265
Beban Pemeliharaan	D.4	72.925.500	550.322.719
Beban Perjalanan Dinas	D.5	567.334.400	4.873.645.306
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat			
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	233.550.260	211.668.929
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.101.658.363)	(95.820.541.156)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.7	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
JUMLAH PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		254.817.413	181.900.000
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		254.817.413	177.601.000
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya		-	4.299.000
Beban penyesuaian Nilai Persediaan		-	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang		-	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		681.651.113	177.601.000
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.420.007.250)	(95.642.940.156)



**LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	6.675.969.119	5.590.682.188
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.420.007.250)	(95.642.940.156)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR		(4.775.002.761)	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.046.023.358	96.728.227.087
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		6.148.986.653	1.085.286.931
EKUITAS AKHIR	E.5	526.982.466	6.675.969.119



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2025 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2023 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
	Penerimaan Dalam Negeri	-	-
	a. Penerimaan Perpajakan		
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	Pendapatan Lain-lain	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	-	-
B	Belanja		
	Belanja Pegawai	3.207.059.000	
	Belanja Barang	1.456.606.000	
	Belanja Modal	23.996.000	0
	Pembayaran Bunga Utang		
	Subsidi		
	Hibah		
	Belanja Bantuan Sosial		-
	Belanja Lain-lain	-	-
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4.687.661.000	0

Realisasi
Pendapatan
Rp 0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	39.219.391	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	426.833.700	-	0,00
Jumlah	426.833.700	39.219.391	0,00

Realisasi Belanja Negara **B.2 Belanja**

Rp
4.959.044.058

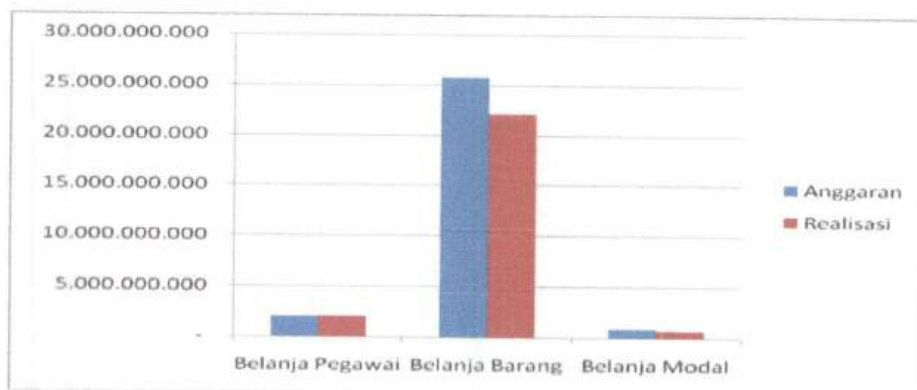
Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2025

adalah sebesar Rp 4.959.044.058 atau 98,00% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.687.661.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.207.059.000	3.119.148.048	97
Belanja Barang	1.456.606.000	1.451.901.011	100
Belanja Bantuan Sosial	-	23.994.999	-
Belanja Modal	23.996.000	-	-
Total Belanja Kotor	4.687.661.000	4.595.044.058	98
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	4.687.661.000	4.595.044.058	98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 97.26% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Reaisasil 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Rupiah Murni dan Pinjaman dari Hibah			
Belanja Pegawai	3.119.148.048	2.658.332.626	50
Belanja Barang	1.451.901.011	88.600.846.167	90
Belanja Modal	23.994.999	-	-
Jumlah	4.595.044.058	91.259.178.793	62

Belanja Pegawai

Rp

3.119.148.048

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.119.148.048 dan Rp 2.658.332.626 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024

Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	0	1.421.438.708	

Belanja Barang

Rp

1.451.148.048

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.451.901.011 Rp 88.600.846.167.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	Real 31 DESEMBER 2025	Real 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	473.954.842	319.338.700	48,42
Belanja Barang Non Operasional	199.042.000	1.852.810.800	(89,26)
Belanja Jasa	151.136.369	84.780.027	78,27
Belanja Pemeliharaan	72.925.500	68.072.350	7,13
Belanja Perjalanan	368.292.400	28.000.000	1.215,33
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	48.378.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	1.265.351.111	2.401.380.377	(47,31)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.265.351.111	2.401.380.377	(47,31)

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-

Belanja Modal

Rp 0,-

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	Real 30 JUNI 2025	Real 31 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0%
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	0%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Di Bendahara
Pengeluaran*

Rp 0,-

C.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Jun-25	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	-
Jumlah	24,000,000	-

1. Utang Pihak Ketiga antara lain :

- a. Akun 512411 : Rp 54.420.948 adalah Tukin PNS Bulan desember 2025 yang telah di

Lunas bayarkan.

- b. Akun 51241 : Rp 3.925.959 adalah Tukin 1 Orang PNS (Suandi) bulan Desember 2025 yang telah di lunas Bayarkan.
- c. Akun 51241 : Rp 24.047.512 adalah Tukin PPPK Bulan desember 2025 yang telah di Lunas bayarkan.
- d. Akun 522113 : Rp 418.350 adalah Tagihan Air Bulan November dan bulan Desember 2025

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31-Dec-25	TH 2024
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Peralatan dan
Mesin
Rp 2.649.514.962,-*

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 2.649.514.962,- dan Rp 2.370.702.550,-

*Gedung dan
Bangunan
Rp 97.718.000,-*

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 97.718.000,- dan Rp 97.718.000,-. Tidak ada mutasi nilai Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Gedung berupa gudang yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Sertifikat Tanah NIB : 11.31.08.17.01582.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp 2.140.637.727,-*

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 2.140.637.727,- dan Rp 1.907.087.467,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.649.514.962		
2	Gedung dan Bangunan	97.718.000		
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000		
	Akumulasi Penyusutan	2.750.432.962		0

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya*

Rp 202.231.500,-

C.6 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 202.231.500,- dan Rp 202.231.500,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN*

Rp 0,-

C.7 Uang Muka Dari KPPN

Saldo uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing 0,- dan Rp 0,-. Akun ini merupakan penyeimbang kas di Bendahara Pengeluaran.

Ekuitas

Rp 526.982.466,-

C.8 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 526.982.466,- dan Rp 6.675.969.119,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pegawai **D.1 Beban Pegawai**

Rp 3.201.542.467,-

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.201.542.467,- dan Rp 2.658.332.626,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31-Dec-25	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
			-
Jumlah	-	-	0,00%

D.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan Rp
0,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 5.884.823.702,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang
dan Jasa*

D.3 Beban Barang dan Jasa

*Rp
1.026.305.736,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 1.026.305.736,- dan

Rp 81.680.967.265,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban
Pemeliharaan
Rp
72.925.500,-*

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 72.925.000,- dan Rp 550.322.719,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp
567.334.400,-*

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan dinas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 567.334.400,- dan Rp 4.873.645.306,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melaksanakan misi KPU yaitu meningkatkan kualitas Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi

Rp
233.550,260,-*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 233.550.260,- dan Rp 211.668.929,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional

Rp 0,-*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas balance dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31-Dec-25	2024	NAIK (TURUN) %
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan aset non lancar	0	0	0,00
Beban Pelepasan asetnon lancar	0	0	0,00
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	254.817.413	177.601.000	0
Pendapatan dari keg non operasional lainnya	254.817.413	181.900.000	0
Beban dari keg non operasional lainnya	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	681.651.113	177.601.000	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal

Rp
6,675.969.119,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6.675.969.119,- dan Rp 5.590.682.188-.

Defisit LO

Rp

4.420.007.250,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 4.420.007.250,- dan Rp 95.642.940.156,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Aset Tetap Non

Revaluasi

Rp 0,-

E.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi pencatatan barang dari barang intrakomtable menjadi barang ekstrakomtable.

Transaksi Antar

Entitas

Rp

3,046,023,358,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar entitas merupakan selisih kenaikan/penurunan ekuitas dengan surplus/ defisit LO.

Ekuitas Akhir

Rp

526.982.466,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 526.982.653,- dan Rp 6.675.969.119,-

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan terjadi revisi DIPA sebagai berikut :

Daftar revisi DIPA

1. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2025 Tanggal 20 Agustus 2025 (Revisi 11)
2. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 17 September 2025 (Revisi 12)
3. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 2 Oktober 2025 (Revisi 13)
4. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 3 November 2025 (Revisi 14)
5. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 5 November 2025 (Revisi 15)
6. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 24 November 2025 (Revisi 16)
7. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 2 Desember 2025 (Revisi 17)
8. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 19 Januari 2026 (Revisi 18)
9. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 20 Januari 2026 (Revisi 19)
10. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 26 Januari 2026 (Revisi 20)
11. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 27 Januari 2026 (Revisi 21)

KOMISI

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SEMIL

LIHAN

UMUM



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 2:18 AM

Tgl Cetak : 30/01/26 9:30 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	39,219,391	(39,219,391)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	39,219,391	(39,219,391)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	39,219,391	(39,219,391)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,201,542,467	2,658,332,626	543,209,841	20.434
Beban Persediaan	0	5,884,823,702	(5,884,823,702)	(100)
Beban Barang dan Jasa	1,026,305,736	81,680,967,265	(80,654,661,529)	(98.744)
Beban Pemeliharaan	72,925,500	550,322,719	(477,397,219)	(86.749)
Beban Perjalanan Dinas	567,334,400	4,873,645,306	(4,306,310,906)	(88.359)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 2:18 AM

Tgl Cetak : 30/01/26 9:30 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	233,550,260	211,668,929	21,881,331	10.338
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,101,658,363	95,859,760,547	(90,758,102,184)	(94.678)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,101,658,363)	(95,820,541,156)	90,718,882,793	(94.676)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	426,833,700	0	426,833,700	
Pendapatan Pelepasan Aset	426,833,700	0	426,833,700	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	254,817,413	177,601,000	77,216,413	43.477
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	254,817,413	181,900,000	72,917,413	40.087
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,299,000	(4,299,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	681,651,113	177,601,000	504,050,113	283.81
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,420,007,250)	(95,642,940,156)	91,222,932,906	(95.379)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,420,007,250)	(95,642,940,156)	91,222,932,906	(95.379)

Keterangan :

FINAL



Kajen, 30 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

BAMBANG YUSMANTO
NIP. 196912021997031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 30/01/26 9:30 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,675,969,119	5,590,682,188	1,085,286,931	19.41
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,420,007,250)	(95,642,940,156)	91,222,932,906	(95.38)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4,775,002,761)	0	(4,775,002,761)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	(4,775,002,761)	0	(4,775,002,761)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,046,023,358	96,728,227,087	(93,682,203,729)	(96.85)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,148,986,653)	1,085,286,931	(7,234,273,584)	(666.58)
EKUITAS AKHIR	526,982,466	6,675,969,119	(6,148,986,653)	(92.11)

Keterangan :

FINAL

Kajen, 30 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO

NIP 196912021997031003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
 ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
 SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PEKALONGAN 657295

Tgl Data : 30/01/26 2:18 AM
 Tgl Cetak : 30/01/26 9:30 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,687,661,000	4,595,044,058	(92,616,942)	98.02	97,401,647,000	91,259,178,793	(6,142,468,207)	93.69
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kajen, 30 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 SEKRETARIS

 BAMBANG YUSMANTO
 NIP. 196912021997031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 2:18 AM
 Tgl Cetak : 30/01/26 9:30 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	5,897,189,761	(5,897,189,761)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	214,570,125	(214,570,125)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	6,111,759,886	(6,111,759,886)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,649,514,962	2,370,702,550	278,812,412	11.76
Gedung dan Bangunan	97,718,000	97,718,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,200,000	3,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,140,637,727)	(1,907,087,467)	(233,550,260)	12.25
JUMLAH ASET TETAP	609,795,235	564,533,083	45,262,152	8.02
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	202,231,500	202,231,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(202,231,500)	(202,231,500)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	609,795,235	6,676,292,969	(6,066,497,734)	(90.87)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	82,812,769	323,850	82,488,919	25,471.34
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	82,812,769	323,850	82,488,919	25,471.34
JUMLAH KEWAJIBAN	82,812,769	323,850	82,488,919	25,471.34
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	526,982,466	6,675,969,119	(6,148,986,653)	(92.11)
JUMLAH EKUITAS	526,982,466	6,675,969,119	(6,148,986,653)	(92.11)
JUMLAH EKUITAS	526,982,466	6,675,969,119	(6,148,986,653)	(92.11)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	609,795,235	6,676,292,969	(6,066,497,734)	(90.87)

Keterangan :
 FINAL

Kajen, 30 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 SEKRETARIS

 BAMBANG YUSMANTO
 NIP 196912021997031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 2:18 AM

Tgl Cetak : 30/01/26 9:31 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,649,514,962	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	97,718,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,200,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,118,488,308
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	22,149,419
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	202,231,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	202,231,500
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	82,394,419
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	418,350
0.0	313111	Ditaghikan ke Entitas Lain	0	3,472,857,058
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	426,833,700	0
0.0	391111	Ekuitas	0	6,675,969,119
0.0	391119	Koreksi Lainnya	4,775,002,761	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	426,833,700
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	254,817,413
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	823,198,160	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,483	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	60,522,722	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,272,858	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,876,805	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	41,424,240	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	123,827,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	27,125,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,344,500	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	138,211,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,026	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,106,580	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,888,262	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,940,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	12,383,820	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	35,840,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,380,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	852,526,701	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	139,783,210	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	41,699,492	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	71,540,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,145,450	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 2:18 AM

Tgl Cetak : 30/01/26 9:31 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	355,569,900	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	163,199,900	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	50,678,507	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,213,262	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,970,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	214,570,125	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	23,350,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	96,368,200	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,685,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,240,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	140,736,400	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,250,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199,042,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	196,306,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	230,944,446	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,605,814	0
JUMLAH			13,256,159,286	13,256,159,286

Keterangan :

FINAL

Kajen, 30 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 SEKRETARIS

 BAMBANG YUSMANTO
 NIP. 196912021997031003



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 30/01/26 9:31 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,595,044,058
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	426,833,700	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	426,833,700
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	823,198,160	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,483	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	60,522,722	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,272,858	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,876,805	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	41,424,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	128,477,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	27,125,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,344,500	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	138,211,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,026	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,106,580	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,888,262	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,940,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12,383,820	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	37,192,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,380,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	789,529,794	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	114,383,698	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	41,699,492	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71,540,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,145,450	0
3.0	521211	Belanja Bahan	355,569,900	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	163,199,900	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	50,678,507	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,213,262	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,876,400	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	23,350,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	96,368,200	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,685,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,240,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140,736,400	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,250,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199,042,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 30/01/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 30/01/26 9:31 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	196,306,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,994,999	0
JUMLAH			5,021,877,758	5,021,877,758

Keterangan :

FINAL

Kajen, 30 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

SEKRETARIS

BAMBANG YUSMANTO

196912021997031003



KOMISI

**CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

PEMILIHAN UMUM

BHINEKA TUNGGAL IKA

13. Perdirjen Kekayaan Negara PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
14. PMK No. 01/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya;
15. KMK RI No. 4/KMK.06/2014 perubahan atas Kepmenkeu No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat;
16. KMK No. 295/KMK.6/2019 tentang penggolongan masa manfaat dalam rangka penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat;
17. KMK RI No. 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya.
18. KMK RI No. 145/KM.6/2016 tentang Perubahan atas KMK RI No. 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya.

B. Entitas Pelaporan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten.

KPU Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.

KPU Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, serta koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota lain dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara ini berisi penjelasan mengenai Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER III 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Kodifikasi Barang Milik Negara

- Kodifikasi barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.
- Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab BMN.
- Sedangkan Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kodifikasi BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

B. Kapitalisasi Barang Milik Negara

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar penetapan kapitalisasi adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam SAP, Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP Nomor 9.

c. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan pada tingkat satuan kerja dan setiap semester tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, dan Pengguna Barang. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan antara UAKPB dan KPKNL, UAPPB-W dan Kantor Wilayah

DJKN, UAPPB-E1 dan UAPB dengan Kantor Pusat DJKN. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009.

D. Penyusutan Barang Milik Negara

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tujuan Penyusutan adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa : Gedung dan bangunan; Peralatan dan mesin; Jalan, irigasi, dan jaringan; dan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna SEMESTER III 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari laporan keuangan dan penyusunan laporan aset di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada SEMESTER II 2025 ini adalah sebesar Rp 2.680.363.862.00 (*Dua milyar*

enam ratus delapan puluh juta tigaratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan SEMESTER II 2025 sebesar Rp 2.541.512.550.00 (*Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), terdapat nilai mutasi sebesar Rp. 108.002.412.00 (Seratus delapan juta dua ribu empat ratus dua belas ruiah), yang terjadi selama SEMESTER II 2025.

Nilai mutasi BMN berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
5. Laporan Penyusutan;
6. Laporan Barang Rusak Berat Yang Belum Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
7. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapan Statusnya (BPYBDS);
8. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
9. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAIBA-SIMAK

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II 2025

1. Saldo Awal Laporan SEMESTER II 2025

Nilai BMN KPU Kabupaten Pekalongan SEMESTER II Rp 2.680.363.862.00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh juta tigaratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan SEMESTER II 2025 sebesar Rp 2.541.512.550.00 (*Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), terdapat nilai mutasi sebesar Rp. 108.002.412.00 (*Seratus delapan juta dua ribu empat ratus dua belas ruiah*), yang terjadi selama SEMESTER II 2025.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara SEMESTER II 2025

Mutasi BMN SEMESTER II 2025 adalah sebagai berikut:

a. **Barang Persediaan**

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 sebesar Rp 0

b. **Tanah.**

KPU Kabupaten Pekalongan tidak memiliki asset tetap berupa tanah.

c. **Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 2.649.514.962,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh juta tigaratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), jumlah tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp 2.541.512.550.00 (*Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), dan terdapat mutasi nilai penambahan Peralatan dan Mesin sejumlah Rp Rp. 108.002.412.00 (*Seratus delapan juta dua ribu empat ratus dua belas ruiah*),.

Terdapat reklasifikasi barang dan mempengaruhi nilai peralatan dan mesin.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 1,103,922,000,00 (*Satu milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal tidak terdapat mutasi nilai penambahan Alat angkutan.

Dari jumlah Alat Angkutan (3.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	18	1.103.922.000
Rusak Ringan	5	191.260.000
Rusak Berat	1	10.971,500

2) Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang Kuasa SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 344.777.226,00 (*Tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 187 buah dengan nilai Rp 344.777.226,00 (*Tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*). terdapat mutasi nilai Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga sebesar Rp 14.321.876 (*Empat belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*)

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	187	344.777.226
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

3) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06),

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 53.715.000,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 11 unit dengan nilai sebesar Rp 53.715.000,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah barang, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	11	53.715.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

4) Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 1.122.632.074,- (*Satu milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 126 unit dengan nilai sebesar Rp 1.122.632.074,- (*Satu milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah*). Terdapat mutasi nilai sebesar Rp 78.911.874,- (*Tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sebelah ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Dari jumlah Alat Komputer (3.10) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	126	1.122.632.074
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat		

5) Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 4.148.662.00 (*Empat juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 11

unit dengan nilai sebesar Rp 4.148.662.00 (*Empat juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).

6) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Total Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 2.118.488.308.00 (*Dua milyar seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah*).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*), tidak terdapat mutasi pada SEMESTER II 2025.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Gedung Bangunan (4.01)

Saldo Gedung Bangunan (4.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	97.718.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Total Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp

22.149.419.00 (*Dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah*).

No. Akun	Uraian	Saldo Tahun Anggaran 2025		
		Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
4,01	Bangunan dan Gedung	97.718.000	22.149.419	75.568.581

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*) berupa 1 unit Maket TPS. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit barang dengan nilai sebesar Rp 3.200.000,00 (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai pada Aset Tetap Lainnya.

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	3.200.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

f. Aset lain-lain

Saldo Aset lain - lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp0,00.

g. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Saldo awal Aset tetap yang tidak di gunakan Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp. 202.231.500,00 (*Dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*). Penyusutan Aset tetap yang tidak di gunakan Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp. 202.231.500,00 (*Dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*)

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebesar Rp 2.983.513.362,00 (*Dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga*

juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar	-	-	-	-	-	-
1	Persediaan	0	0,00%	0	-	-	0,00%
	Sub Jumlah (1)	-	0,00%	0	-	-	0,00%
II	Aset Tetap	2.983.513.362	1	-	-	2.781.281.862	1
1	Tanah	-	0,00%	0	-	-	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	2.680.363.862	89,84%	-	-	2.680.363.862	89,84%
3	Gedung dan Bangunan	97.718.000	3,28%	0	-	97.718.000	3,28%
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000	0,11%	0	-	3.200.000	0,11%
	Sub Jumlah (2)	2.781.281.862	93,11%	-	-	2.781.281.862	93,11%
III	Aset Lainnya	202.231.500	0	-	-	202.231.500	0
1	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	202.231.500	6,78%	0	-	202.231.500	6,78%
	Sub Jumlah (3)	202.231.500	6,78%	-	-	202.231.500	6,78%
	Total	2.983.513.362	100%	-	-	2.983.513.362	100%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut.

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	2.118.488.308	98,97%	27.634.600	100%	2.146.122.908	98,98%
2	Gedung dan Bangunan	22.149.419	1,03%	0	0	22.149.419	1,02%
	Sub Jumlah (I)	2.140.637.727	100%	27.634.600	100%	2.168.272.327	100%
II	Aset Lainnya						
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah		0%	0	0%	-	0%
	Sub Jumlah (I)	-	0%	0%	0%	-	0%
	Total	2.140.637.727	100%	27.634.600	100%	2.168.272.327	100%

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.649.514.962	2.649.514.962	-
3	Gedung dan Bangunan	97.718.000	97.718.000	-
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000	3.200.000	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Laporan Semester I TA 2025	2.642.430.550		12,91
2	Laporan Semester II TA 2025	2.983.513.362	341.082.812	12,91

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER II 2025 adalah sebagai berikut :

b. Pengelolaan BMN/Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Penanggungjawab UAKPB
Sekretaris

Bambang Yusmanto
NIP. 19691202 199703 1 003

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
PERIODE SEMESTER II 2025**

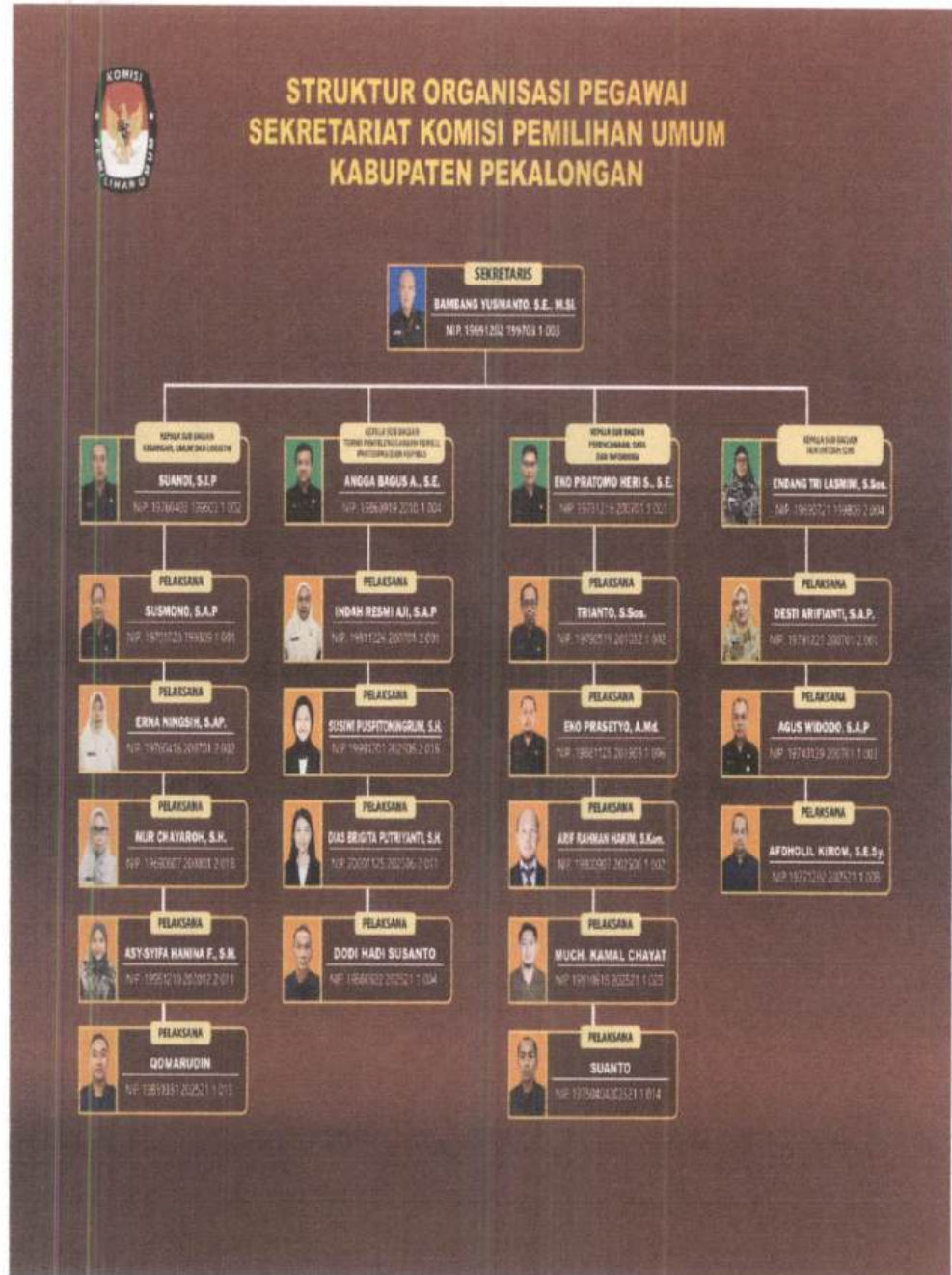
I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK. 06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatnya Partisipasi dalam Pemilihan Tahun 2025, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

1. Visi Komisi Pemilihan Umum
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
2. Misi Komisi Pemilihan Umum
 - a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
 - b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
 - d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025		% thd Ang	DESEMBER
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	426.833.700	0,00	39.219.391
JUMLAH PENDAPATAN		-	426.833.700	0,00	39.219.391
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3.207.059.000	3.119.148.048	97	2.658.332.626
Belanja Barang	B.4	1.456.606.000	1.451.901.011	100	88.600.846.167
Belanja Modal	B.5	23.996.000	23.994.999	100	-
JUMLAH BELANJA		4.687.661.000	4.595.044.058	98	91.259.178.793